

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Indonesia merupakan negara sedang berkembang dengan masalah kependudukan yang cukup serius yaitu jumlah penduduk yang besar disertai dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata. Jumlah penduduk bukan hanya merupakan modal bagi suatu negara, tetapi juga akan merupakan beban dalam pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan nasional perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Di samping itu, perkembangan penduduk perlu diarahkan pada pengendalian kualitas, pengembangan kualitas, serta pengarahannya mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang menguntungkan pembangunan.

Bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia antara tahun 2010-2025 merupakan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pembangunan, dimana penduduk usia produktif sangat banyak, penduduk usia muda sangat rendah dan penduduk usia tua belum banyak. Artinya akan banyak penduduk usia produktif yang siap masuk pasar kerja. Kondisi ini dapat menjadi keuntungan maupun kebuntuan bagi Indonesia. Untung apabila pemerintah dapat menyikapinya dengan menyediakan lapangan kerja disertai penyaluran modal

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan penduduk usia produktif melalui berbagai rogram seperti lokakarya yang dapat memperluas kesempatan penduduk untuk berwirausaha sehingga dalam hal ini tidak hanya pemerintah saja yang dapat membuka lapangan kerja, penduduknya pun dapat melakukan hal yang sama. Buntung apabila pemerintah lambat menyikapinya, karena angkatan kerja ini akan menanggung penduduk usia yang tidak produktif, artinya mereka memerlukan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Apabila lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan penawaran terhadap pekerjaan, maka akan terjadi pengangguran yang sangat besar di berbagai sudut wilayah di Indonesia.

Tuntutan akan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak karena kualitas/mutu pendidikan di Indonesia dianggap oleh banyak kalangan masih rendah. Hal ini bisa terlihat dari beberapa indikator diantaranya lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki. Rendahnya kualitas pendidikan Indonesia disorot pula karena deraan jumlah lulusan sekolah atau lembaga pelatihan yang menganggur.

Pengangguran di Indonesia pada umumnya di dominasi oleh kelompok berpendidikan tinggi dan berusia muda, padahal seharusnya mereka yang pernah mengenyam pendidikan tinggi berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keahlian masing-masing. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok usia muda, dengan usia yang masih produktif mereka dapat melakukan apapun yang diinginkan, termasuk etos kerja yang tinggi, mempunyai lingkungan

perguruan yang luas serta keterampilan. Dalam kenyataannya kelompok inilah yang paling banyak terdapat pengangguran. Hal ini terjadi karena banyak penduduk Indonesia yang putus sekolah hingga tamat sekolah dasar dan memilih untuk bekerja menjadi buruh kasar untuk membantu orangtuanya. Oleh karena itu pasar tenaga kerja Indonesia didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah.

Periode 2020-2025, penduduk Indonesia turun dengan kecepatan 0,82 persen per tahun. Turunnya laju pertumbuhan ini disebabkan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian, namun penurunan karena kelahiran lebih cepat daripada penurunan karena kematian. Dalam kurun waktu yang sama usia produktif (15-64 tahun) meningkat dari 66,6 persen menjadi 68,7 persen dan untuk lanjut usia, penduduk yang berusia 65 tahun ke atas naik dari 4,9 persen menjadi 8,1 persen. Perubahan susunan ini mengakibatkan beban ketergantungan (dependency ratio) turun menjadi 45,6 persen pada tahun 2025.

Berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2010 hingga tahun 2025, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Bonus ini tidak datang serta merta dan menjadi keuntungan. Bonus demografi akan dapat dinikmati dengan memenuhi persyaratan antara lain program pengendalian pertumbuhan penduduk yang berhasil dan kualitas penduduk yang tinggi pada usia-usia produktif. Menurut Bloom, Canning dan Sevilla (Adioetomo, 2005 : 25) menekankan bahwa ada beberapa faktor penting bonus demografi dalam menjelaskan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu penawaran tenaga kerja (*labor supply*), peranan perempuan (*women role*), tabungan (*savings*), dan sumber daya manusia (*human capital*).

Tabel 1.1
Dependency Ratio Menurut Provinsi, Tahun 2010-2025

Provinsi	Tahun			
	2010	2015	2020	2025
Aceh	56.3	54.8	53.6	50.8
Sumatera Utara	58.0	56.3	55.3	53.6
Sumatera Barat	57.7	55.8	54.8	53.6
Riau	54.1	51.5	49.7	48.4
Kepulauan Riau	46.8	49.7	46.4	41.8
Jambi	50.8	47.3	44.5	43.3
Sumatera Selatan	51.3	49.7	48.4	47.3
Kepulauan Bangka Belitung	48.6	46.2	44.9	44.3
Bengkulu	51.3	47.9	46.2	44.9
Lampung	51.1	49.5	48.6	47.3
DKI Jakarta	37.4	39.9	42.0	42.2
Jawa Barat	49.9	47.7	46.4	46.4
Banten	48.6	46.4	45.3	43.9
Jawa Tengah	49.9	48.1	47.7	48.4
DI Yogyakarta	45.8	44.9	45.6	46.8
Jawa Timur	46.2	44.3	43.9	44.3
Bali	47.3	45.6	43.3	42.2
Nusa Tenggara Barat	55.8	53.8	52.2	50.2
Nusa Tenggara Timur	70.6	66.7	63.4	62.1
Kalimantan Barat	52.7	50.8	49.7	48.8
Kalimantan Tengah	50.4	46.2	43.3	41.4
Kalimantan Selatan	49.3	48.6	47.7	46.2
Kalimantan Timur	48.6	46.2	44.5	43.7
Sulawesi Utara	47.9	46.6	46.4	46.8
Gorontalo	51.7	48.6	47.5	47.7
Sulawesi Tengah	52.7	50.6	49.7	49.5
Sulawesi Selatan	56.0	52.9	51.3	50.4
Sulawesi Barat	60.5	56.0	53.8	52.7
Sulawesi Tenggara	63.4	60.5	58.0	54.6
Maluku	63.1	59.7	58.2	57.5
Maluku Utara	61.3	58.5	56.0	53.4
Papua	53.8	47.5	43.7	42.0
Papua Barat	53.6	49.9	47.1	45.3
INDONESIA	50.5	48.6	47.7	47.2

Sumber : Publikasi BPS Indonesia

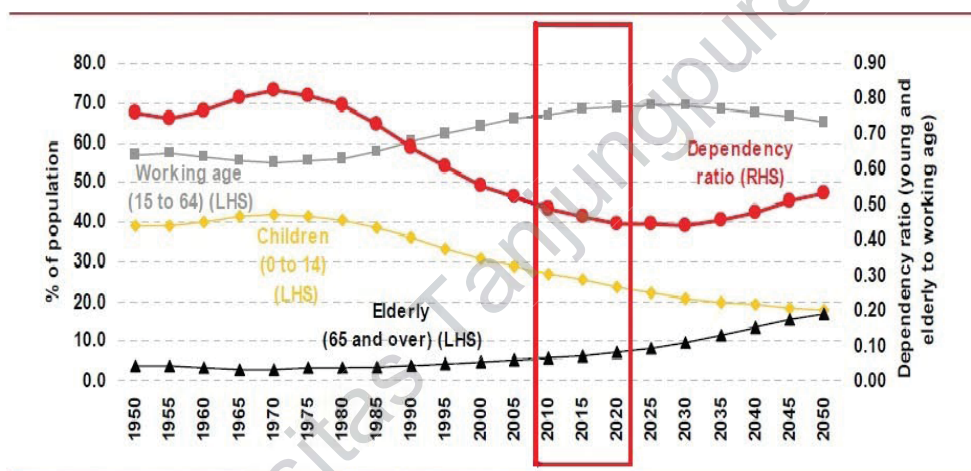
Berdasarkan tabel 1.1, dapat terlihat bahwa beban ketergantungan Indonesia mulai dari tahun 2010 - 2025 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010 beban ketergantungan Indonesia sebesar 50,5 persen. Artinya setiap 100 penduduk produktif mempunyai tanggungan sebanyak 50 penduduk yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Beban ketergantungan Indonesia akan terus mengalami penurunan hingga tahun 2025 sebesar 47,2 persen. Penurunan ini terjadi terutama karena penurunan tingkat kelahiran sebagai dampak dari keberhasilan program keluarga berencana selama beberapa tahun terakhir.

Pada masing-masing provinsi di Indonesia, beban ketergantungan yang paling tinggi berada pada Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2010 sebesar 70,6 persen. Angka ini secara konsisten mengalami penurunan hingga tahun 2025 yaitu sebesar 62,1 persen. Namun tetap merupakan angka ketergantungan yang paling tinggi di seluruh Provinsi di Indonesia. Artinya, penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menanggung 62 penduduk tidak produktif dari total 100 penduduk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masih banyak penduduk Nusa Tenggara Timur yang berusia tidak produktif. Beban ketergantungan terendah berada pada DKI Jakarta tahun 2010 yaitu sebesar 37,4 persen. Dengan rendahnya beban ketergantungan ini maka dapat terlihat bahwa provinsi-provinsi yang lebih dulu berpeluang mendapatkan bonus demografi adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, dan lainnya. Artinya hampir sebagian besar provinsi di Indonesia akan berpeluang mendapatkan bonus demografi pada tahun 2010-2025. Namun masih ada provinsi lainnya yang harus menunggu untuk

berpeluang mendapatkan bonus demografi diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara. Hal ini dikarenakan beban tanggungannya masih di atas 50.

Gambar: 1.1

Capaian Bonus Demografi di Indonesia



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1, dalam gambar di atas terlihat dapat bahwa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2010-2025. Dalam rentang tahun 2010-2025, angka ketergantungan Indonesia berada pada titik terendah yaitu sebesar 44 persen. Artinya dari 100 penduduk Indonesia hanya akan menanggung 44 penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia produktif Indonesia berada pada tingkat tertinggi dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Pada waktu rentang demikian, Indonesia akan semakin maju apabila

kualitas sumber daya manusia yang masuk dalam usia produktif dapat didukung dengan pendidikan yang baik, tersedianya lapangan kerja, dan lainnya.

Tabel 1.2

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi, Agustus 2010-2013

Provinsi Province	TPT/UR				TPAK/LFPRs			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Nanggoroe Aceh Darussalam	8.37	7.43	9.10	10.30	63.17	63.78	61.77	62.07
Sumatra Utara	7.43	6.37	6.20	6.53	69.51	72.09	69.41	70.67
Sumatera Barat	6.95	6.45	6.52	6.99	66.36	66.19	64.47	62.94
Riau	8.72	5.32	4.3	5.50	63.66	66.38	62.90	63.62
Kepulauan Riau	6.9	7.80	5.37	6.25	68.85	67.48	66.25	65.58
Jambi	5.39	4.02	3.22	4.84	65.78	67.67	65.07	62.66
Sumatera Selatan	6.65	5.77	5.70	5.00	70.23	71.15	69.56	66.50
Kepulauan Bangka Belitung	5.63	3.61	3.49	3.70	66.53	68.43	65.67	65.32
Bengkulu	4.59	2.37	3.61	4.74	71.86	73.83	70.07	67.32
Lampung	5.57	5.78	5.18	5.85	67.95	68.00	66.27	64.70
DKI Jakarta	11.05	10.80	9.87	9.02	67.83	69.36	71.56	68.09
Jawa Barat	10.33	9.83	9.08	9.22	62.38	62.27	63.78	63.01
Banten	13.68	13.06	10.13	9.90	65.34	67.79	65.03	63.53
Jawa Tengah	6.21	5.93	5.63	6.02	70.6	70.77	71.43	70.72
DI Yogyakarta	5.68	3.97	3.97	3.30	69.76	68.77	70.85	68.89
Jawa Timur	4.25	4.16	4.12	4.33	69.08	68.49	69.62	69.92
Bali	3.06	2.32	2.04	1.79	77.38	76.45	76.97	75.35
Nusa Tenggara Barat	5.29	5.33	5.26	5.38	66.63	66.12	66.02	65.44
Nusa Tenggara Timur	3.34	2.69	2.89	3.16	72.77	71.72	70.58	68.72
Kalimantan Barat	4.62	3.88	3.48	4.03	73.17	73.93	71.77	69.75
Kalimantan tengah	4.14	2.55	3.17	3.09	69.86	72.89	69.90	68.21
Kalimantan Selatan	5.25	5.23	5.25	3.79	71.26	73.31	71.93	69.08
Kalimantan Timur	10.1	9.84	8.9	8.04	66.41	68.51	66.64	63.79
Sulawesi Utara	9.61	8.62	7.79	6.68	63.31	65.32	61.93	59.76
Gorontalo	5.16	4.26	4.36	4.12	64.42	64.12	63.08	62.00
Sulawesi Tengah	4.61	4.01	3.93	4.27	69.22	73.11	66.38	65.92
Sulawesi Selatan	8.37	6.56	5.87	5.10	62.14	64.32	62.82	60.49
Sulawesi Barat	3.25	2.82	2.14	2.33	71.46	72.27	71.73	66.82
Sulawesi Tenggara	4.61	3.06	4.04	6.68	71.86	71.42	67.35	65.79
Maluku	9.97	7.38	7.51	9.75	66.48	69.47	63.71	62.31
Maluku Utara	6.03	5.55	4.76	3.86	65.11	67.45	66.35	64.38
Papua	3.55	3.94	3.63	3.23	80.99	78.45	78.91	78.01
Papua Barat	7.68	8.94	5.49	4.62	69.29	70.78	67.12	66.41
Indonesia	7.14	6.56	6.14	6.25	67.72	68.34	67.88	66.90

Sumber : Statistik Indonesia 2010-2013,
Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia 2010-2013

Berdasarkan tabel 1.2, dapat terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia dari tahun 2010-2013 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada Agustus 2010, TPT Indonesia sebesar 7,14 yang merupakan TPT tertinggi selama empat tahun terakhir, kemudian menurun pada Agustus 2012 yaitu sebesar 6,14 persen. TPT ini merupakan TPT terendah selama empat tahun terakhir, kemudian meningkat kembali pada Agustus 2013 sebesar 6,25 persen, artinya dari 100 penduduk Indonesia yang masuk dalam angkatan kerja 6 di antaranya menganggur.

Jika dilihat dari TPT per pulau, hanya Pulau Jawa yang TPT nya lebih besar dibandingkan TPT nasional, yaitu seperti Banten pada tahun 2010 sebesar 13,68 persen. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya penduduk pendatang di Pulau Jawa (berimplikasi jumlah angkatan kerja tinggi) namun cukup banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan (banyak penganggur). Kondisi sebaliknya terjadi di Pulau lainnya seperti (Bali, NTT, NTB dan lainnya) yang memberikan gambaran cukup fantastik yang dimiliki oleh Bali pada Agustus 2013 dimana TPT nya hanya sebesar 1,79. Artinya dari 100 penduduk Bali yang masuk dalam angkatan kerja, hanya 1 di antaranya yang menganggur.

Berdasarkan data TPAK diatas, dapat terlihat dari tahun 2010-2013 bahwa TPAK Indonesia dari tahun ke tahun terus menurun. Pada tahun 2011, TPAK Indonesia sebesar 68,34 persen. Ini merupakan TPAK tertinggi selama empat tahun terakhir, kemudian terus menurun hingga tahun 2013 sebesar 66,90 persen. Dilihat dari masing-masing provinsi di Indonesia, Papua merupakan pemilik

TPAK tertinggi yaitu pada Agustus 2010 sebesar 80,99 persen. Pemilik TPAK terendah berada pada Sulawesi Utara sebesar 59,76 persen pada Agustus 2013.

Tabel. 1.3

**Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan
Dan Provinsi, Agustus 2010-2013**

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah				Pendidikan Menengah				Pendidikan Tinggi			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Aceh	36.59	37.83	39.81	37.03	49.11	49.98	50.99	49.69	14.30	12.19	9.19	13.29
Sumatera Utara	35.78	38.77	44.50	37.04	48.56	51.17	46.37	51.89	15.66	10.05	9.12	11.06
Sumatera Barat	37.43	44.12	43.64	39.05	42.25	45.95	44.39	47.33	20.32	9.93	11.97	13.62
Riau	35.24	35.54	44.34	36.66	50.14	54.63	45.17	50.96	14.62	9.83	10.49	12.38
Jambi	41.78	54.22	37.67	41.05	34.88	34.64	48.98	48.70	23.34	11.14	13.26	10.25
Sumatera Selatan	44.25	39.55	45.07	32.16	44.82	51.24	42.58	49.58	10.93	9.21	12.35	18.26
Bengkulu	33.19	39.76	36.22	38.83	43.08	42.94	52.87	47.72	23.73	17.30	10.91	13.44
Lampung	39.19	46.78	46.70	42.22	43.05	47.09	45.92	47.23	17.76	6.12	7.38	10.55
Kep.Bangka Belitung	45.48	42.86	48.48	40.63	34.86	51.91	40.13	50.43	19.56	5.23	11.39	8.95
Kepulauan Riau	50.73	26.67	28.73	33.10	41.93	61.47	64.33	59.78	7.43	11.86	6.93	7.12
DKI Jakarta	16.85	35.31	34.79	33.30	58.80	49.62	45.66	55.89	24.35	15.07	19.55	10.84
Jawa Barat	59.16	59.16	62.17	60.78	60.45	33.39	33.23	34.35	7.68	7.45	4.60	4.87
Jawa Tengah	51.09	55.71	60.62	58.20	37.87	34.15	33.14	36.83	11.04	10.14	6.24	4.97
DI Yogyakarta	28.07	23.65	28.40	21.11	46.80	56.57	52.27	60.78	25.13	19.79	19.33	18.11
Jawa Timur	50.10	49.07	49.84	48.57	39.02	41.01	42.94	45.74	10.88	9.91	7.22	5.67
Banten	45.86	61.04	55.17	52.64	43.41	34.09	36.28	41.20	10.72	4.87	8.54	6.15
Bali	34.17	33.84	33.31	25.82	48.02	45.98	48.38	52.42	17.80	20.18	18.32	21.77
Nusa Tenggara Barat	59.59	63.12	48.41	43.55	34.12	26.69	42.29	43.17	6.29	10.19	9.30	13.28
Nusa Tenggara Timur	32.29	50.95	48.01	40.87	47.27	35.05	39.99	40.58	20.44	14.00	12.00	18.55
Kalimantan Barat	54.68	52.09	56.11	46.79	35.26	40.19	38.18	45.13	10.05	7.72	5.71	8.08
Kalimantan Tengah	52.72	50.87	46.06	34.09	21.94	35.61	38.96	48.27	25.34	13.52	14.98	17.04
Kalimantan Selatan	34.59	60.10	62.63	53.14	50.26	31.24	32.28	40.59	15.15	8.66	5.09	6.27
Kalimantan Timur	29.58	47.12	53.27	44.07	50.71	45.38	42.63	47.09	19.71	7.50	4.10	8.84
Sulawesi Utara	32.17	40.96	39.40	36.22	51.40	47.65	51.50	53.56	16.43	11.39	9.10	10.22
Sulawesi Tengah	45.49	50.28	38.12	46.38	45.73	39.83	44.59	40.72	8.68	9.89	17.29	12.90
Sulawesi Selatan	41.12	52.13	46.92	35.53	43.97	37.02	38.57	46.15	14.91	10.85	14.51	18.32
Sulawesi Tenggara	27.23	31.63	26.96	31.62	45.16	50.24	49.32	51.88	27.61	18.13	23.72	16.50
Gorontalo	31.38	59.37	55.96	32.58	61.73	27.97	32.81	44.73	6.89	12.66	11.23	22.69
Sulawesi Barat	45.36	39.74	66.42	47.45	34.89	54.96	27.62	41.21	19.75	5.29	5.96	11.35
Maluku	26.27	34.99	22.13	21.85	57.24	51.40	53.50	57.12	16.49	13.61	24.37	21.02
Maluku Utara	19.88	33.54	44.12	34.44	60.52	47.65	44.43	43.21	19.60	18.81	11.45	22.05
Papua Barat	40.87	28.88	31.61	27.29	37.44	43.96	55.07	53.99	21.69	27.16	13.32	18.72
Papua	41.01	36.67	29.16	32.50	43.42	49.92	53.30	48.50	15.57	13.41	17.54	19.00
Indonesia	45.88	50.49	51.58	48.39	41.22	39.93	39.66	43.11	12.90	9.57	8.76	8.50

Sumber : Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia,
Agustus 2010-2013

Berdasarkan tabel 1.3, dapat terlihat bahwa secara keseluruhan pada periode Agustus 2011-2013, pengangguran terdidik di Indonesia cenderung terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pengangguran tertinggi berada pada penduduk berpendidikan dasar ke bawah pada tahun 2012 yaitu sebesar 51,58 persen, pengangguran terendah berada pada penduduk berpendidikan tinggi yaitu pada tahun 2013 sebesar 8,50 persen. Alasan banyaknya pengangguran di tingkat pendidikan dasar kebawah adalah banyak penduduk yang tidak dapat melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat atas. Padahal dalam kenyataannya banyak penduduk yang berpendidikan rendah memilih untuk bekerja serabutan dan membantu orang tua mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan di tingkat atas dengan alasan keterbatasan biaya dan memilih untuk menikah.

Dilihat dari masing-masing provinsi, terlihat bahwa Nusa Tenggara Barat memiliki pengangguran tertinggi selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2011 pada tingkat pendidikan dasar ke bawah sebesar 63,12 persen. Pengangguran terendah berada pada Kalimantan Timur tahun 2012 pada tingkat pendidikan tinggi sebesar 4,10 persen.

Tabel 1.4
Persentase Pengangguran Usia Muda Menurut Tipe Daerah
Di Indonesia, Agustus 2010-2013

Provinsi	2010		2011		2012		2013	
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
Aceh	28.06	24.41	14.17	17.56	20.83	20.42	25.78	23.13
Sumatra Utara	23.95	17.21	16.95	9.12	18.71	8.65	19.37	11.31
Sumatera Barat	21.35	17.92	14.77	12.25	18.94	14.54	21.84	15.74
Riau	19.02	16.57	14.97	7.20	11.60	7.95	16.92	10.61
Kepulauan Riau	11.77	16.95	11.60	9.07	9.46	8.37	21.61	9.24
Jambi	17.79	14.15	6.78	8.50	9.14	6.93	13.48	11.13
Sumatera Selatan	24.02	14.92	17.58	8.75	16.02	9.13	15.92	8.50
Kepulauan Bangka Belitung	16.47	13.24	9.13	5.09	9.01	5.64	9.20	5.92
Bengkulu	19.69	14.39	5.81	5.40	12.88	6.23	14.94	10.09
Lampung	23.16	16.34	18.92	9.09	21.02	7.67	21.98	12.25
DKI Jakarta	14.18	16.31	15.74	11.54	14.32	18.32	14.01	15.24
Jawa Barat	22.51	28.97	18.21	19.92	18.88	19.20	18.33	25.56
Banten	19.47	31.68	20.72	25.28	15.83	19.93	17.92	26.57
Jawa Tengah	20.87	21.79	13.41	11.98	13.8	12.61	13.71	15.39
DI Yogyakarta	18.68	15.53	11.74	7.90	11.22	10.00	10.26	9.54
Jawa Timur	17.59	18.05	10.45	9.74	11.81	10.05	12.87	11.20
Bali	8.78	8.24	6.80	2.97	4.65	3.77	5.79	3.43
Nusa Tenggara Barat	30.69	21.08	8.67	9.72	12.29	11.38	15.27	9.37
Nusa Tenggara Timur	24.92	7.35	14.88	3.98	14.20	5.43	17.87	6.57
Kalimantan Barat	20.46	10.51	13.24	6.89	11.47	6.36	11.99	8.26
Kalimantan tengah	18.52	11.93	7.03	4.38	7.84	6.81	9.44	5.69
Kalimantan Selatan	16.87	14.09	15.16	7.65	13.2	7.37	11.99	7.42
Kalimantan Timur	18.35	18.96	21.06	14.86	19.35	14.31	18.59	15.79
Sulawesi Utara	29.99	29.29	26.56	15.79	19.59	15.56	20.94	15.85
Gorontalo	20.78	16.18	8.78	6.99	11.63	6.65	17.29	7.22
Sulawesi Tengah	23.36	15.55	10.70	7.01	15.01	6.24	14.15	8.60
Sulawesi Selatan	26.79	21.39	12.54	10.98	16.79	9.62	15.32	9.89
Sulawesi Barat	19.88	12.99	7.62	5.70	4.84	3.82	5.28	5.50
Sulawesi Tenggara	25.92	19.28	10.92	5.62	16.43	6.36	17.41	5.87
Maluku	32.93	18.66	23.88	12.74	20.05	16.47	30.91	21.50
Maluku Utara	22.99	12.10	18.76	10.12	14.37	8.53	11.76	7.82
Papua	20.39	2.63	18.44	4.61	21.57	3.82	19.57	3.78
Papua Barat	29.13	13.88	33.46	9.45	20.48	8.13	22.51	5.30
Indonesia	20.26	18.90	15.29	11.06	15.33	11.16	15.89	13.40

Sumber : Statistik pemuda Indonesia Tahun 2010-2013

Berdasarkan tabel 1.4, dapat terlihat bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2013, persentase pengangguran usia muda di Indonesia terus menurun baik di perkotaan maupun di perdesaan namun pengangguran usia muda di perkotaan selalu lebih tinggi daripada di perdesaan. Persentase pengangguran usia muda di perkotaan tertinggi berada pada tahun 2010 yaitu sebesar 20,26 persen dan terus menurun hingga tahun 2013 yaitu sebesar 15,89 persen atau turun sebesar 4,37 persen. Hal yang sama juga terjadi pada pengangguran usia muda di perdesaan. Pada tahun 2010 dengan persentase sebesar 18,90 persen dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2013 yaitu sebesar 13,40 persen.

Dilihat dari masing-masing provinsi di Indonesia, persentase pengangguran usia muda di perkotaan juga terlihat lebih tinggi daripada di perdesaan namun terus mengalami penurunan hingga tahun 2013. Provinsi dengan persentase pengangguran usia muda terbesar terdapat di perkotaan yaitu Papua Barat sebesar 33,46 persen pada tahun 2011 disusul oleh Sulawesi Utara, Maluku, dan Kalimantan Timur masing-masing sebesar 26,56, 23,88, dan 21,06 persen. Persentase tersebut melebihi persentase Indonesia. Provinsi dengan persentase pengangguran usia muda di perdesaan terkecil yaitu terdapat di Bali pada tahun 2011 yaitu sebesar 2,97 persen disusul oleh Papua, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penulis ingin mengkaji masalah yang terjadi di Indonesia. Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Bonus Demografi Terhadap Pengangguran Terdidik dan Pengangguran Usia Muda di Indonesia” yang diukur berdasarkan parameter pengangguran terdidik jenjang pendidikan dasar ke bawah, menengah dan tinggi serta pengangguran usia muda di perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah bonus demografi berpengaruh terhadap pengangguran terdidik jenjang pendidikan dasar ke bawah di Indonesia ?
2. Apakah bonus demografi berpengaruh terhadap pengangguran terdidik jenjang pendidikan menengah di Indonesia ?
3. Apakah bonus demografi berpengaruh terhadap pengangguran terdidik jenjang pendidikan tinggi di Indonesia ?
4. Apakah bonus demografi berpengaruh terhadap pengangguran usia muda di perkotaan di Indonesia ?
5. Apakah bonus demografi berpengaruh terhadap pengangguran usia muda di perdesaan di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh bonus demografi terhadap pengangguran terdidik jenjang pendidikan dasar ke bawah di Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh bonus demografi terhadap pengangguran terdidik jenjang pendidikan menengah di Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh bonus demografi terhadap pengangguran terdidik jenjang pendidikan tinggi di Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh bonus demografi terhadap pengangguran usia muda di perkotaan di Indonesia.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh bonus demografi terhadap pengangguran usia muda di perdesaan di Indonesia.

1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah supaya lebih meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan angkatan kerja di Indonesia serta membuat kebijakan- kebijakan yang dapat menekan angka pengangguran di kalangan terdidik dan di kalangan usia muda.
2. Bagi Akademisi semoga dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut.